

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan, Nasution. 2016. *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*. Cetakan 2. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang, Waluyo. 1996. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*. Cetakan 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief. 2001. *"Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*. Citra Aditya Bakri. Bandung.
- Harun M, Husen. 1990. *"Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia"*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Yahya, Harahap. 2006. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mochamad Munir, 1998, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat (Suatu renungan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa)*, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2006. *"Metode Penelitian Hukum"*. Kencana. Jakarta.
- Salim, H. S. 2002. *"Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Cetakan 13. CV. Rajawali. Jakarta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta,
- Widyastuti S.M Sumardi, 2004. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, UGM Press, Yogyakarta.
- Zain, Alam Setia. 1996. *"Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana"*. Rineka Cipta. Jakarta.

B. Jurnal

- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*”, PAMPAS: *Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.
- Djarot Indra Kurnia, et. al., “*Implementasi Penyidikan terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2019, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.
- Eka Febrianti, “*Perananan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Upaya Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*”, Skripsi, Universitas Jambi, 2019.
- I Putu Gede Ardhana, *Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia*, Jurnal Metamorfosa, Universitas Udayana, Vol.3 No.2. 2016, Hlm.124. diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/metamorfosa/article/view/23674>.
- Muhammad Karno dan Dahlia, “*Peran PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/608/1/3.%20M%20Karno%20%26%20Dahlia.pdf>.
- Ridolof, Hermanus. “*Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*”. Jurnal Katalogis 4, 5 (2016), Hlm.197 diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6606>,
- Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48, 2017, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105>.
- Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hlm. 65. diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>.

Uswantun Hasanah, Yulia Monita, “*Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 3, 2020, di akses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>.

Yohana Anggieta, Herry Liyus, Nys Arfa, “*Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 2, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>.

Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “*Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 55, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, L.N. Tahun 1981/No. 76, TLN. No. 3209.

-----, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan

-----, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

-----, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

-----, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan

-----, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta, 2007